

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta, 1997.

Indrajaya, Rudi, Emelia Kontesta, Rizkika Arkan PuteraIndrajaya, *Pengantar Hukum Agraria: Teori dan Praktek*, Cetakan Kesatu, Bandung, Refika, 2020.

ND, Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Pamulardi, Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan Kesatu, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Pamulardi , Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, 2014.

Parlindungan, A.P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, 1994.

Sumardjono, Maria S.W., *Tanah dalam perpektif Hak Ekonomi, Sosisal dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008

Sumardjono, Maria S.W. , “*Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Jurnal-jurnal/Tesis :

Baharudin, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Proses Jual Beli Tanah”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Universitas Lampung, Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.

Hidayat, Rozi Aprian, Artikel Ilmiah, “Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertipikat Ha katas Tanah pada Kawasan Hutan”, *Jurnal Ius*, Volume 4, Nomor 2, 2020

Ishimora, Irena Lucy, Suparjo Sujadi, dan Enny Keoswani, “Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah pada Kawasan Taman Wisata Teluk Yousefa”, *Jurnal Universitas Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 2020

Marzuki, Agus, ”Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Register 45, Mesuji, Lampung dalam Perspektif Keadilan”, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2016.

Lusita Jenike, *Pendaftaran Pertama Kali berdasarkan Alas Hak Tebas Hutan di Kabupaten Batanghari*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2018.

Martana, Putu Ade Harriesta, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Universitas Udayana, Maret 2014.

Putri, Ayu Bimo Setyo, Artikel Ilmiah, “Itikad Baik Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2017.

Suwartapradja, “Transmigrasi Lokal: Potensi dan Tantangan”, *Jurnal Kependudukan*, Volume, 4 Nomor 2, Juli 2002/

Tanjung, Perkasa Alamsyah, “Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah di atas Lahan Tanah yang dialihfungsikan dari Kawasan Hutan Pasca Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 597/MENHUT-II/2014”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2017.

Verbist, Bruno dan Gamal Pasya, “Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Koflik, dan Negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat”, *Jurnal Agrivita*, Volume 26, Nomor 3, 2020.

Internet :

Badan Pemeriksa Keuangan, “Peta Provinsi Lampung”, <https://lampung.bpk.go.id/>, diakses pada 20 Juli 2022.

Badan Pusat Statiska, “Kabupaten Lampung Timur dalam Angka (2020)”, <https://lampungtimurkab.bps.go.id/>, diakses pada 23 Februari 2022.

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kawasan Hutan Provinsi Lampung, <https://dishut.lampungprov.go.id/pages/profil-kehutanan-provinsi-lampung>, diakses tanggal 30 Agustus 2022.

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, : “Transmigrasi”,
<https://distransnaker.katingankab.go.id> diakses pada 10 Juni 2022.

Irham, M.A., “Lembaga Perwatin dan Punyimbangan Adat di Masyarakat
Lampung”, *Medianeliti.com*, diakses pada 01 Juni 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/itikad>, diakses pada 18 Juli 2022.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/responden>, diakses pada 30 Juli 2022.

KBBI online, <https://kbbi.web.id/tumpangsari> diakses pada 01 Agustus 2022

Kementerian Lingkungan Hidup, “Pedoman Monitoring Terpadu Penanganan
Perambahan”, <http://ksdae.menlhk.go.id>, diakses pada 15 Juli 2022.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, “Info Geofrafis Kabupaten Lampung
Timur”, <http://lampungtimurkab.go.id>, diakses pada 22 Juli 2022.

Rizkia, Salsabila Miftah, “Data Analisis : Teknik Analisis Data Kualitatif”, *dqlab.id*
diakses tanggal 31 Februari 2022.

Universitas Gadjah Mada, “Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum
UGM”, <http://ugm.ac.id>, diakses pada 17 Agustus 2022.

Vania, Hana Farah “Kantongi Izin HTR, Masyarakat Register 40 Tak Lagi
Berkebun”, <https://Katadata.com/>, diakses pada 25 Februari 2022.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pertanahan.

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Sejumlah
biaya kepada negara.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999
tanggal 15 Juni 1999

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 67/kpts-II/1991
tanggal 31 Januari 1991

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/Kpts-II/2000 tanggal
23 Agustus 2000

Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor
171/SKPTS/01/1996 tertanggal 17 Juni 1996

Surat Keputusan Kepala Desa Sindang Anom Nomor 001/SKPTS/01/1996